



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALIM SETIAWAN SLAMET**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **691031**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.875.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/130 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/130 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 905.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
3. MOBIL, GEELY SUV Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 12.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.251.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 7.043.500.000**



III. HUTANG

Rp. 2.614.375.238

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.429.124.762

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.